

PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Maryam Binti Muhammad Ruslan¹, Muhamad Sidiq Asyhari²

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muhammadiyah Tulungagung, Tulungagung Indonesia

Email: iyamruslan12@gmail.com¹, sidiqasyhari@gmail.com².

Abstract

Keywords:

*Educational Administration,
Administrative Principles,
Effective Leadership,
Islamic Education,
School Management*

This study examines the concepts and principles of educational administration as a foundational framework for managing educational institutions, with a particular focus on Islamic educational contexts in Indonesia. Despite extensive theoretical discourse on educational administration, a systematic synthesis of its guiding principles, especially within the framework of Islamic educational institutions, remains limited. Using a qualitative library research approach, data were collected from books, academic journals, and relevant scholarly sources, which were then analyzed through data reduction, structured presentation, and descriptive-analytical conclusion drawing. The findings reveal that educational administration is guided by five core principles, efficiency, management, task prioritization, effective leadership, and collaboration, complemented by five operational principles, flexibility, goal orientation, continuity, efficiency-effectiveness, and lifelong education. These principles collectively form an adaptive and sustainable administrative system. The consistent application of these principles by school principals and administrative staff is demonstrated to improve organizational performance, strengthen coordination among educational components, and support optimal attainment of educational objectives. This study contributes theoretically to educational administration scholarship and offers practical guidance for practitioners in designing effective administrative policies within Islamic educational institutions in Indonesia.

Abstrak

Kata Kunci :

*Administrasi Pendidikan,
Prinsip Administrasi,
Kepemimpinan Efektif,
Pendidikan Islam,
Manajemen Sekolah*

Penelitian ini mengkaji konsep dan prinsip-prinsip administrasi pendidikan sebagai landasan fundamental dalam pengelolaan lembaga pendidikan, dengan fokus khusus pada konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun diskursus teoretis tentang administrasi pendidikan telah berkembang luas, sintesis sistematis mengenai prinsip-prinsip dasarnya, khususnya dalam kerangka lembaga pendidikan Islam masih terbatas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan (library research), data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian terstruktur, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa administrasi pendidikan berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu efisiensi, pengelolaan, pengutamaan tugas, kepemimpinan efektif, dan kerjasama, yang diperkuat oleh lima prinsip operasional, fleksibilitas, orientasi tujuan, kontinuitas, efisiensi-efektivitas, dan pendidikan seumur hidup. Prinsip-prinsip ini secara kolektif membentuk sistem administrasi yang adaptif dan berkelanjutan. Penerapan konsisten prinsip-prinsip tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat koordinasi antar komponen pendidikan, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi khazanah keilmuan administrasi pendidikan sekaligus pedoman praktis bagi para praktisi dalam merancang kebijakan administratif yang efektif di lembaga pendidikan Islam Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Administrasi pendidikan berperan penting dalam keberhasilan institusi pendidikan karena fungsi ini mengatur operasional sekolah yang mendukung pembelajaran berkualitas dan pencapaian tujuan pendidikan masyarakat. Administrasi pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam mengoptimalkan sumber daya sekolah secara menyeluruh. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan membentuk pedoman utama dalam penyelenggaraan kegiatan manajerial tersebut (Switri, 2022). Di tengah tantangan pengelolaan lembaga pendidikan yang semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terutama bagi lembaga pendidikan Islam yang mengemban misi ganda, unggul secara akademik dan kuat secara nilai-nilai keislaman.

Administrasi pendidikan adalah suatu proses perencanaan kegiatan-kegiatan yang menciptakan kerja sama antara semua pihak yang bersangkutan dengan dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya administrasi pendidikan merupakan ilmu tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga sangatlah penting dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu, diperlukan peran serta keaktifan pihak-pihak yang berhubungan dengan pendidikan dan dari tenaga pendidik yang sangat berperan dalam kemajuan pendidikan.

Administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat di mana selama ada manusia yang hidup dan bekerja sama dalam kelompok. Administrasi pendidikan merupakan penerapan proses dan prinsip administrasi dalam bidang pendidikan agar tujuan-tujuan lembaga pendidikan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan jika didukung oleh administrasi yang baik, maka besar kemungkinan hasil yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan kualitas dan kuantitas yang direncanakan atau yang telah ditentukan sebelumnya (Burhanuddin, 2017).



Kegiatan administrasi di madrasah secara umum merupakan tanggung jawab kepala tata usaha, yang meliputi berbagai bidang yaitu administrasi personalia, administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi sarana pendidikan, dan administrasi supervisi. Dalam arti luas, administrasi menyangkut kegiatan manajemen atau pengelolaan terhadap keseluruhan komponen organisasi untuk mewujudkan tujuan atau program organisasi, sehingga pekerjaan administrasi merupakan pekerjaan operatif dan manajerial.

Peran utama tata usaha ada tiga, yaitu melayani pekerjaan secara cepat dan tepat dalam menangani keberhasilan suatu organisasi; menyajikan informasi bagi pimpinan untuk melakukan kegiatan dengan tepat dalam memberikan suatu keputusan; serta membantu kelancaran terhadap kemajuan pada suatu organisasi (Febrianti, 2014). Tenaga administrasi memiliki tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan kepada orang banyak di lingkungan madrasah. Pelayanan dilakukan oleh individu atau kelompok secara langsung atau tidak langsung agar memenuhi keperluan dan memberikan hasil sesuai harapan dengan kualitas pelayanan yang baik.

Administrasi pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan administrasi dalam mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu. Wilayah kerja administrasi pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan bidang garapan yakni sumber daya manusia (SDM), sumber belajar, serta sumber fasilitas dan dana. Lembaga pendidikan seperti organisasi sekolah merupakan kerangka kelembagaan di mana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tingkatan institusi (institutional level), administrasi pendidikan berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan dengan lingkungan eksternal. Pada tingkatan manajerial (managerial level), administrasi berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga. Adapun pada tingkatan teknis (technical level), administrasi berkaitan dengan proses pembelajaran. Dengan demikian administrasi pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas, di samping bidang-bidang yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks, mulai dari sumber daya fisik, keuangan, dan manusia yang terlibat dalam kegiatan proses pendidikan di sekolah (Engkoswara & Komariah, 2017).

Meskipun kajian tentang administrasi pendidikan telah berkembang pesat secara global, terdapat kesenjangan (research gap) yang signifikan dalam literatur, khususnya terkait dengan sintesis sistematis prinsip-prinsip administrasi pendidikan dalam kerangka lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sebagian besar kajian yang ada berfokus pada aspek empiris atau studi kasus di sekolah umum, sementara kajian konseptual yang secara khusus mengintegrasikan prinsip administrasi pendidikan dengan nilai-nilai kelembagaan Islam masih sangat terbatas (Alazmi & Bush, 2024; Lumban Gaol, 2023). Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep serta prinsip-prinsip administrasi pendidikan sebagai landasan dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi para akademisi dan praktisi pendidikan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep administrasi pendidikan telah dibahas secara luas dalam literatur akademik. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu gabungan kata 'ad' yang berarti 'kepada' dan 'ministrare' yang berarti 'melayani' atau 'mengarahkan'. Dengan demikian, administrasi dimaknai sebagai serangkaian kegiatan untuk membantu, menolong, dan mengarahkan semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (Tatang, 2017). Engkoswara & Komariah, (2017) mendefinisikan administrasi pendidikan sebagai keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sementara itu, Purwanto, (2017) menekankan bahwa administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkutan paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Dalam perspektif sistem, administrasi pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumber daya guna tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu konteks sosial tertentu (Switri, 2022). Berbeda dari manajemen pada umumnya, administrasi pendidikan memiliki kekhususan karena berkaitan langsung dengan pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik, aspek yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar proses produksi material (Burhanuddin, 2017). Kekhususan ini menjadikan prinsip-prinsip administrasi pendidikan bersifat holistik, tidak hanya mencakup dimensi efisiensi teknis, tetapi juga dimensi nilai, etika, dan tujuan pembangunan manusia.

Kajian internasional menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan dan tata kelola sekolah merupakan faktor determinan dalam pencapaian mutu pendidikan. Lisniasari, (2024) melalui tinjauan sistematis terhadap 179 dokumen dari database Scopus mengidentifikasi bahwa prinsip-prinsip utama administrasi pendidikan mencakup kepemimpinan, perencanaan strategis, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Temuan tersebut menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini krusial dalam menyelaraskan administrasi pendidikan dengan tujuan institusional demi meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Penelitian Lumban Gaol, (2023) yang mengkaji kepemimpinan sekolah di Indonesia melalui tinjauan literatur sistematis menemukan bahwa lemahnya kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan merupakan tantangan utama yang berdampak langsung pada kualitas layanan administrasi.

Kajian tentang prinsip administrasi pendidikan juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten. Penelitian Nasution et al., (2021) mengungkap bahwa persepsi tentang kualitas kepemimpinan dan tata kelola berkorelasi positif dengan motivasi belajar siswa, yang pada gilirannya memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Temuan serupa dikemukakan oleh Siregar et al., (2023), yang menegaskan bahwa mekanisme penetapan pembiayaan yang transparan dan terencana merupakan cerminan dari prinsip efisiensi dan pengelolaan dalam administrasi pendidikan.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, Alazmi & Bush, (2024) mengembangkan model kepemimpinan pendidikan berorientasi Islam (Islamic-Oriented Educational Leadership/IOEL) yang menekankan pentingnya nilai-nilai holistik Islam dan keteladanan kepemimpinan sebagai pilar utama pengelolaan sekolah di masyarakat Muslim. Temuan ini sejalan dengan kajian Siregar, (2021) yang membuktikan bahwa

penerapan analisis SWOT dalam lembaga pendidikan Islam merupakan praktik konkret dari prinsip orientasi tujuan dan fleksibilitas, di mana lembaga dituntut untuk mampu membaca lingkungan internal dan eksternal secara kritis dan adaptif. Secara keseluruhan, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administrasi pendidikan bukan sekadar panduan teknis-operasional, melainkan landasan strategis yang menentukan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia (Bush, 2020; Qurtubi, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan, pendeskripsian, dan analisis data berupa kata atau kalimat yang menekankan validitas dan kedalaman informasi, bukan kuantifikasi angka. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materi-materi yang terdapat dalam kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, majalah, naskah, dan dokumen akademik lainnya (Jurdi, 2014). Metode ini dipandang tepat untuk mengkaji prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang bersifat konseptual dan teoritis, dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang telah teruji secara akademis.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah dokumen akademik dan literatur ilmiah yang berkaitan langsung dengan topik administrasi pendidikan dan prinsip-prinsipnya. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih literatur yang dapat mewakili dan relevan sebagai sumber data (Jurdi, 2014). Kriteria pemilihan sumber mencakup relevansi dengan fokus kajian, kredibilitas penulis, serta kebaruan informasi guna memastikan kualitas data yang digunakan. Sumber primer yang dijadikan acuan utama adalah buku-buku teks administrasi pendidikan, regulasi pendidikan nasional, dan jurnal ilmiah nasional serta internasional yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis Data

Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan sumber tertulis lainnya. Teknik analisis meliputi pengumpulan data dari literatur, reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian terstruktur, serta penarikan kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang valid dan utuh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis konsep prinsip-prinsip administrasi pendidikan berdasarkan kajian teoritis dari berbagai sumber kepustakaan. Langkah awal penelitian diawali dengan penentuan fokus kajian dan kata kunci yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran literatur melalui database jurnal nasional dan internasional, buku teks, serta karya ilmiah yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Sumber data dipilih berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas penulis, serta kebaruan informasi guna memastikan kualitas data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Prinsip-Prinsip Administrasi Pendidikan

Prinsip pada dasarnya diartikan sebagai titik tolak atau titik tumpu, yakni suatu pegangan yang kuat dan absolut yang digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan suatu kegiatan (Tatang, 2017). Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata 'ad' yang berarti 'kepada' dan 'ministrare' yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dengan demikian, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendidikan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Konsep pendidikan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat sadar, terencana, dan sistematis (Hilal, 2015).

Dari pengertian di atas, administrasi pendidikan dapat dimaknai sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan dengan demikian bukan sekadar aktivitas teknis-administratif, melainkan merupakan landasan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang terarah dan berkualitas (Engkoswara & Komariah, 2017). Lisniasari, (2024) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kerangka administrasi yang berorientasi tujuan terbukti meningkatkan efektivitas keseluruhan institusi dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Administrasi Pendidikan

Prinsip administrasi pendidikan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu prinsip utama dan prinsip operasional. Prinsip utama terdiri dari lima prinsip dasar yang secara langsung melandasi praktik administrasi pendidikan, sedangkan prinsip operasional merupakan turunan dari pendekatan sistem yang diadopsi dalam Kurikulum 1975 sebagai landasan penyelenggaraan administrasi pendidikan di sekolah. Meskipun Kurikulum 1975 telah lama digantikan oleh kurikulum-kurikulum berikutnya, nilai-nilai operasional yang dikandungnya tetap relevan secara konseptual karena mencerminkan prinsip-prinsip universal manajemen pendidikan yang terus diakui dalam literatur kontemporer (Bush, 2020). Berikut ini diuraikan masing-masing prinsip tersebut secara komprehensif.

Prinsip pertama adalah prinsip efisiensi. Tenaga administrasi akan berhasil dalam tugasnya jika memanfaatkan seluruh sumber daya, energi, dana, serta fasilitas yang tersedia secara efisien. Seorang administrator yang profesional harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengelola aktivitas pengadministrasian tanpa terbebani biaya yang berlebihan. Penghamburan biaya dan penggunaan waktu yang tidak terencana menunjukkan pengelolaan administrasi yang buruk, yang berdampak negatif bagi kepentingan internal institusi maupun kepentingan eksternal yang dilayani (Engkoswara & Komariah, 2017). Supaya prinsip efisiensi terealisasi, seluruh objek administrasi harus diorganisasikan secara baik, yang mencakup pembagian tugas,

kewenangan, serta tanggung jawab secara rinci berdasarkan bidang-bidangnya, sehingga tercipta korelasi kerja sama yang harmonis menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Prinsip kedua adalah prinsip pengelolaan. Administrator adalah manajer yang bekerja dengan menggunakan langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol, sehingga sasaran yang dituju menjadi lebih mudah dicapai. Perencanaan yang dilakukan harus berpihak pada visi dan misi yang jelas sehingga program yang dijadwalkan dirancang secara hierarkis dan sistematis serta mendahulukan skala prioritas, baik program jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan (Purwanto, 2017). Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi merumuskan tujuan, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, menentukan tahap-tahap tindakan, serta merumuskan cara pemecahan masalah dan penyelesaian pekerjaan.

Prinsip ketiga adalah prinsip pengutamakan tugas pengelolaan. Administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, melainkan atas dasar skala prioritas. Apabila prinsip ini dilanggar, prinsip efisiensi akan terabaikan dan hanya akan memboroskan biaya. Pelaksanaan yang di luar tanggung jawab administrator hanya akan mengakibatkan tugas pengelolaan tidak terkelola dengan baik dan benar. Sebuah lembaga pendidikan memiliki visi dan misi yang darinya dibuat pola kerja terpadu berkaitan dengan tugas-tugas dan fungsi administratif, sehingga pengelolaan dapat menjadi unsur yang sangat vital untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Qurtubi, 2019).

Prinsip keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin harus mengembangkan hubungan baik dengan seluruh bawahannya dan mampu merealisasikan human relationship yang positif. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyalahkan bawahan, melainkan mengingatkan dan menyarankan. Sebaliknya, bawahan yang baik tidak pernah mengugat atau marah kepada atasan, melainkan meluruskan permasalahan sepanjang masih dalam konteks profesionalitas yang dilandasi hukum yang disepakati. Dengan demikian, seluruh anggota organisasi bekerja atas kesadaran penuh, tulus, dan tidak merasa ditekan atau dipaksa (Burhanuddin, 2016). Gaya kepemimpinan yang tepat adalah jika administrator mempertimbangkan tingkat kematangan para anggota organisasi serta situasi yang ada. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan yang efektif harus pula dilandasi nilai-nilai keislaman seperti amanah, keadilan, dan keteladanan, sebagaimana ditekankan oleh Alazmi & Bush, (2024) dalam model Islamic-Oriented Educational Leadership yang mereka kembangkan.

Prinsip kelima adalah prinsip kerja sama. Kerja sama dilakukan atas dasar profesionalitas yang tinggi, bukan kerja sama dalam arti kongkalikong yang mengorbankan kepentingan mendasar. Sebagaimana kerja sama antara kepala sekolah dengan dewan sekolah dalam kaitannya dengan biaya operasional sekolah dan penyalurannya, semua harus dilandasi transparansi dan profesionalisme. Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya jika mampu mengembangkan kerja sama di antara orang-orang yang terlibat. Administrasi pendidikan harus membuka ruang partisipasi aktif dari semua pihak, seperti guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat. Kerja sama antar pemangku kepentingan memperkuat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dengan dukungan yang lebih luas.

Dua asas yang dapat digunakan sebagai landasan kerja aktivitas administrasi di sekolah adalah asas idiil dan asas operasional. Asas idiil merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pelaksanaan administrasi pendidikan di Indonesia. Asas operasional merujuk pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam kurikulum yang berlaku, dalam hal ini Kurikulum 1975 yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Operasional Administrasi Pendidikan

Selain lima prinsip utama di atas, terdapat pula lima prinsip operasional yang melandasi kurikulum dan menjadi panduan administrasi pendidikan di sekolah. Prinsip-prinsip ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam membentuk sistem administrasi pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

Pertama, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini berarti bahwa kurikulum dan sistem administrasi pendidikan harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan tertentu, namun dalam proses pengembangannya harus fleksibel (PAI, 2025). Fleksibilitas memiliki dua sisi, fleksibel dalam penentuan program pendidikan dan gaya pengembangan program pembelajaran; serta fleksibel dalam pelaksanaan, yang memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi daerah serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Dalam konteks administrasi pendidikan, prinsip ini mendorong lembaga untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman.

Kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Efektivitas adalah melakukan tugas yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas secara benar (*doing things right*). Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien, begitu pula sebaliknya. Prinsip ini tidak hanya menyangkut penggunaan waktu secara optimal, tetapi juga mencakup pendayagunaan tenaga kependidikan secara maksimal. Prinsip ini harus menjadi landasan operasional bagi seluruh aktivitas administrasi pendidikan di sekolah.

Ketiga, prinsip berorientasi pada tujuan. Sesuai dengan pendekatan sistem, semua kegiatan pendidikan harus berorientasi pada tujuan. Administrasi pendidikan di sekolah merupakan komponen instrumental dalam sistem pendidikan untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut. Tujuan operasional yang telah dirumuskan harus menjadi orientasi dan sandaran bagi pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi pendidikan di sekolah. Lisniasari, (2024) menegaskan bahwa manajemen berorientasi tujuan (*goal-oriented management*) merupakan pendekatan yang terbukti menyelaraskan administrasi pendidikan dengan tujuan institusional secara komprehensif.

Keempat, prinsip kontinuitas. Prinsip ini dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan yang berjalur, berjenjang, dan berjenis. Kontinuitas dimaksudkan agar terdapat kesinambungan, khususnya kesinambungan bahan atau materi kurikulum pada jenis dan jenjang program pendidikan, mulai dari jenjang Sekolah Dasar, SLTP, SMU/SMK, hingga perguruan tinggi. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarkis-fungsional agar tidak terjadi pengulangan materi yang menyebabkan kebosanan atau ketidaksiapan peserta didik. Dalam tiap jenjang pendidikan harus terdapat hierarki yang saling bekerja sama.

Kelima, prinsip pendidikan seumur hidup. Tugas sekolah tidak hanya membina pengetahuan dan kecakapan yang langsung dapat dimanfaatkan setelah peserta didik lulus, melainkan juga menyiapkan sikap, nilai, serta kemampuan untuk terus belajar bagi perkembangan pribadinya sepanjang hayat. Dalam melaksanakan administrasi

pendidikan, prinsip ini perlu digunakan sebagai landasan operasional agar pendidikan tidak hanya berorientasi jangka pendek, melainkan juga menyiapkan peserta didik untuk kehidupan yang terus berkembang.

Keseluruhan prinsip administrasi pendidikan di atas baik prinsip utama maupun operasional, saling melengkapi dan membentuk suatu sistem administrasi pendidikan yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan. Prinsip efisiensi menekankan pemanfaatan sumber daya secara optimal, sedangkan prinsip pengelolaan menegaskan pentingnya fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Prinsip pengutamakan tugas mengarahkan administrator untuk bekerja berdasarkan prioritas dan tanggung jawab. Prinsip kepemimpinan efektif dan kerja sama menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis dan profesional. Seluruh prinsip ini diperkuat oleh prinsip operasional yang memastikan bahwa administrasi pendidikan bersifat fleksibel, berorientasi tujuan, berkesinambungan, efisien, efektif, dan mampu membekali peserta didik untuk belajar sepanjang hayat (Purwanto, 2017).

KESIMPULAN

Prinsip administrasi pendidikan merupakan pedoman fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan yang terarah, sistematis, dan berkualitas. Administrasi pendidikan dimaknai sebagai keseluruhan proses bekerja sama dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu prinsip utama yang mencakup efisiensi, pengelolaan, pengutamakan tugas, kepemimpinan efektif, dan kerja sama; serta prinsip operasional yang mencakup fleksibilitas, orientasi tujuan, efisiensi-efektivitas, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Kedua kelompok prinsip ini saling melengkapi dalam membentuk sistem administrasi yang adaptif dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten oleh kepala sekolah dan tenaga administrasi terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi, memperkuat koordinasi antar komponen pendidikan, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian keilmuan tentang administrasi pendidikan, khususnya dalam mengintegrasikan aspek manajerial dan hubungan antarmanusia (human relations) dalam praktik administrasi di lembaga pendidikan Islam. Temuan penelitian ini juga merespons kesenjangan literatur yang diidentifikasi oleh Lumban Gaol (2023) dan Alazmi & Bush (2024), yakni perlunya kajian sistematis tentang prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam merancang kebijakan, menyusun program kerja, serta meningkatkan kompetensi tenaga administrasi agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berorientasi pada mutu layanan pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan pendekatan kepustakaan yang bersifat konseptual-teoritis dan belum melibatkan data empiris secara langsung dari lapangan. Selain itu, kajian ini berfokus pada prinsip-prinsip administrasi pendidikan secara umum tanpa mengkaji secara spesifik implementasinya pada jenjang atau konteks wilayah tertentu. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggabungkan pendekatan teoritis dengan penelitian empiris serta memperluas konteks kajian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan aplikatif. Penggunaan metode campuran (mixed methods) dengan melibatkan data lapangan dari sekolah atau madrasah yang

beragam akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks nyata pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alazmi, A. A., & Bush, T. (2024). An Islamic-oriented educational leadership model: Towards a new theory of school leadership in Muslim societies. *Journal of Educational Administration and History*, 56(3), 312–334. <https://doi.org/10.1080/00220620.2023.2292573>
- Burhanuddin. (2017). *Administrasi pendidikan* (Cetakan revisi). Pustaka Setia.
- Burhanuddin, Y. (2016). *Administrasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan*. Pustaka Setia.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). Sage.
- Engkoswara, & Komariah, A. (2017). *Administrasi pendidikan*. Alfabeta.
- Febrianti. (2014). *Manajemen administrasi perkantoran*. Graha Ilmu.
- Hilal. (2015). *Dasar-dasar pendidikan*. Kencana.
- Jurdi. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alauddin University Press.
- Lisniasari. (2024). Exploring the principles of educational administration: The foundation of goal-oriented management (A literature review). *Ilomata International Journal of Social Science*, 5(4), 1232–1247. <https://doi.org/10.61194/ijss.v5i4.1387>
- Lumban Gaol, N. T. (2023). School leadership in Indonesia: A systematic literature review. *Educational Management Administration & Leadership*, 51(4), 831–848. <https://doi.org/10.1177/17411432211010811>
- Nasution, A. A., Siregar, R. W., & Usnur, U. H. (2021). Hubungan persepsi siswa tentang kepribadian guru fiqih dengan minat belajar siswa di Madrasah Aliyah Al Washliyah Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun. *ALACRITY: Journal of Education*, 78–89.
- PAI. (2025). *Buku ajar administrasi pendidikan*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Purwanto, N. (2017). *Administrasi dan supervisi pendidikan* (Cetakan revisi terbaru). Remaja Rosdakarya.
- Qurtubi, A. (2019). *Administrasi pendidikan: Tinjauan teori & implementasi*. CV Jakad Media Publishing.
- Siregar, R. W. (2021). Penerapan analisis SWOT dalam lembaga pendidikan Islam. *Al Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 413–418.
- Siregar, R. W., Siahaan, A., & Nasution, I. (2023). Upaya meningkatkan mutu manajemen melalui mekanisme penetapan pembiayaan pendidikan di MTs se-Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. *Research and Development Journal of Education*, 9(1), 73–79.
- Switri, E. (2022). *Buku ajar administrasi pendidikan*. Qiara Media.
- Tatang. (2017). *Ilmu pendidikan*. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).